

Nama : Sheryn Aquino Panjaitan

NPM : 2312011479

Kuis hukum international

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawab :

1. Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.

2. Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu Negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama Negara-negara dalam masyarakat internasional.

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu Negara. Sedangkan subjek hukum internasional adalah Negara-negara anggota masyarakat internasional.

Hukum internasional mengatur antar negara berdaulat, sementara hukum nasional mengatur hubungan antar warganegara serta warganegara dengan negara.

3. Perusahaan asing atau MNCs masuk ke subjek hukum internasional karena melakukan kontrak international namun terbatas

Nancy L. Mensch sendiri berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua alasan mengapa harus diadakan pembebanan tanggungjawab hukum terhadap MNCs.

Pertama, MNCs mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang.

Kedua, sebagian kewenangan negara di banyak negara berkembang secara tidak langsung jatuh kepada MNC karena MNCs sering mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti transportasi, tenaga listrik, dan telekomunikasi

4. Yang berhak mendatangi sebuah perjanjian internasional public di suatu negara adalah perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah negara tersebut, yang memiliki wewenang khusus, seperti diplomat
5. Tentu dalam pemerintahan suatu negara kita sebagai warga negara tersebut harus mendahulukan hukum nasional atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negaranegara pada tatanan internasional. Sedangkan hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.

Namun penting untuk di catat bahwa setiap negara berbeda beda, ada yang lebih condong ke hukum internasional dan ada yang lebih condong ke hukum negara nya sendiri.

6. Salah satu contoh kasus hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional adalah kasus antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kasus ini mencakup pertentangan klaim kedaulatan atas beberapa pulau dan fitur geografis di wilayah tersebut.

Pada tahun 2013, Filipina mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, terkait klaim Tiongkok terhadap sebagian besar Laut China Selatan berdasarkan pada "Nine-Dash Line." Filipina mengklaim bahwa klaim Tiongkok melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Filipina dan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk klaim wilayah yang luas di Laut China Selatan. Keputusan ini menyatakan bahwa "Nine-Dash Line" Tiongkok tidak sesuai dengan UNCLOS. Meskipun Tiongkok menolak untuk mengakui dan menerima keputusan tersebut, kasus ini menunjukkan pentingnya lembaga penyelesaian sengketa internasional dalam menangani perselisihan antar negara.